



**KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**KERANGKA ACUAN KERJA  
(K A K)**

**DINAS PERINDUSTRIAN DAN  
TENAGA KERJA**

**TAHUN ANGGARAN 2022**



**PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA**

Alamat: Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota  
Jl. Prof. Dr. H. Aziz Haily MA Bukit Limau Telp/Fax. (0752) 7074747 Kode Pos 26271

---

**KERANGKA ACUAN KERJA – KAK**

*Term Of Reference - TOR*

**Unit Kerja** : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

**Bidang** : Sekretariat

**Program** : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

**TAHUN ANGGARAN 2022**



## KERANGKA ACUAN KERJA

SKPD	: DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
Program	: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Sasaran Program	: Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah
Kegiatan	: Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: Fasilitas Kunjungan Tamu
<b>Detil Kegiatan</b>	
1. Latar Belakang (why)	: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja banyak dan sering menerima kunjungan tamu, baik dari dalam daerah maupun luar daerah (propinsi dan luar propinsi). Kunjungan ini bisa berupa acara pertemuan formal maupun tidak formal. Oleh karena itu kunjungan tersebut difasilitasi dengan menyiapkan makan dan minum/snack.
2. Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"><li>- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);</li><li>- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;</li><li>- Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 04 Tahun 2001 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 15);</li><li>- Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 6);</li><li>- Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);</li><li>- Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 5);</li><li>- Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 93);</li><li>- Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 92 Tahun 2021 Tentang Pedoman pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;</li><li>- Surat Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 422 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Wewenang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2022.</li></ul>
3. Alasan Kegiatan Dilaksanakan	: Kegiatan ini dilaksanakan untuk memfasilitasi kunjungan tamu berupa penyediaan makan dan minum/snack
4. Kegiatan Yang Dilaksanakan (what) Uraian Kegiatan	: Kegiatan fasilitasi kunjungan tamu berupa penyediaan makan dan minum / snack untuk tamu dinas
Tujuan	: Agar terfasilitasinya tamu-tamu dinas
5. Indikator Keluaran dan Keluaran Indikator Keluaran (kualitatif) Keluaran (kuantitatif)	: Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
6. Cara Pelaksanaan Kegiatan (how) Metode Pelaksanaan Tahapan Kegiatan	: : Swakelola 1. Melakukan pemesanan makan dan minum/snack 2. Melakukan pembayaran dan menyiapkan kuitansi pembayaran 3. Menyiapkan kelengkapan SPJ 4. Penandatanganan SPJ
7. Tempat pelaksanaan Kegiatan (where)	: Kantor Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
8. Pelaksana dan Penanggung Jawab Kegiatan (who) Pelaksana kegiatan Penanggungjawab kegiatan Penerima manfaat	: PPTK : PA : ASN Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

9. Jadwal Kegiatan

Waktu pelaksanaan kegiatan (when)

Matriks pelaksanaan kegiatan (time table)

- Melakukan pemesanan makan dan minum/snack
- Melakukan pembayaran dan menyiapkan kuitansi pembayaran
- Menyiapkan kelengkapan SPJ
- Penandatanganan SPJ

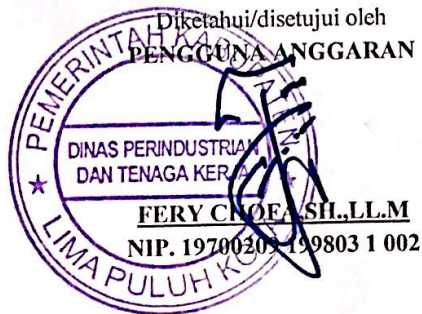
: 12 (dua belas) bulan

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agt	Sep	Okt	Nop	Des

10. Biaya (how much): total biaya yang diperlukan

Rp

31.050.000



Sarilamak, 05 Januari 2022

PPTK

**AFRIZAL S.Sos.,M.Si**  
**NIP. 19720817 199202 1 001**



# KERANGKA ACUAN KERJA

SKPD	: DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
Program	: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Sasaran Program	: Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah
Kegiatan	: Administrasi Umum Perangkat Daerah
Sub Kegiatan	: Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
<b>Detil Kegiatan</b>	
1. Latar Belakang (why)	: Koordinasi dan konsultasi sangat dibutuhkan oleh OPD dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi, baik secara vertikal maupun secara horizontal dan dilaksanakan dalam daerah atau luar daerah. Pelaksanaan koordinasi dan konsultasi yang dilakukan berdasarkan surat perintah tugas dari pimpinan dengan persetujuan prinsip dari Sekda/Bupati.
2. Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"><li>- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);</li><li>- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;</li><li>- Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 04 Tahun 2001 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 15);</li><li>- Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 6);</li><li>- Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);</li><li>- Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 5);</li><li>- Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 93);</li><li>- Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 92 Tahun 2021 Tentang Pedoman pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;</li><li>- Surat Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 422 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Wewenang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2022.</li></ul>
3. Alasan Kegiatan Dilaksanakan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD sangat penting dilakukan untuk mencapai kinerja OPD sesuai tugas pokok dan fungsinya</li><li>- Tercukupinya biaya perjalanan dinas untuk mengikuti rakor dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah</li></ul>
4. Kegiatan Yang Dilaksanakan (what) Uraian Kegiatan	: Kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD yang dilakukan adalah untuk perjalanan dinas biasa (dalam propinsi dan luar propinsi) dan perjalanan dinas dalam kota (dalam daerah)
Tujuan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kegiatan ini bertujuan mencapai kinerja sesuai tugas pokok dan fungsi</li><li>- Terpenuhinya kebutuhan biaya perjalanan dinas</li><li>- Terpenuhinya biaya kebutuhan akomodasi perjalanan dinas ke luar daerah</li></ul>
5. Indikator Keluaran dan Keluaran Indikator Keluaran (kualitatif) Keluaran (kuantitatif)	<ul style="list-style-type: none"><li>: Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja</li><li>: Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah dan luar daerah</li></ul>
6. Cara Pelaksanaan Kegiatan (how) Metode Pelaksanaan Tahapan Kegiatan	<ul style="list-style-type: none"><li>: Swakelola</li><li>1. Persiapan, materi yang akan dikoordinasikan dan konsultasikan (jika ada, sesuai surat undangan)</li><li>2. Jika ke luar daerah, membuat persetujuan prinsip dari Sekda/Bupati</li><li>3. Membuat surat perintah tugas yang ditandatangani pimpinan</li><li>4. Melakukan koordinasi dan konsultasi</li><li>6. Membuat laporan hasil koordinasi dan konsultasi yang dilaporkan ke pimpinan</li></ul>

8. Pelaksana dan Penanggung Jawab Kegiatan (who)

Pelaksana kegiatan : PPTK  
 Penanggungjawab kegiatan : PA  
 Penerima manfaat : ASN Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

9. Jadwal Kegiatan

Waktu pelaksanaan kegiatan (when) : 11 (sebelas) bulan

Matriks pelaksanaan kegiatan (time table)

- Persiapan, materi yang akan dikoordinasikan dan konsultasikan (jika ada, sesuai surat undangan)
- Jika ke luar daerah, membuat persetujuan prinsip dari Sekda / Bupati
- Membuat surat perintah tugas yang ditandatangani pimpinan
- Melakukan koordinasi dan konsultasi
- Membuat laporan hasil koordinasi dan

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agt	Sep	Okt	Nop	Des

10. Biaya (how much): total biaya yang diperlukan

Rp 79.377.000



Sarilamak, 05 Januari 2022

PPTK

AFRIZAL S. Sos., M.Si  
 NIP. 19720817 199202 1 001



## KERANGKA ACUAN KERJA

SKPD	: DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
Program	: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
Sasaran Program	: Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah
Kegiatan	: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan	: Penyediaan Jasa Surat Menyurat
<b>Detil Kegiatan</b>	:
1. Latar Belakang (why)	: Terpenuhinya jasa surat menyurat dalam rangka meningkatnya pelayanan teknis administrasi, pengelolaan keuangan, umum dan kepegawaian
2. Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);</li> <li>- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;</li> <li>- Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 04 Tahun 2001 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 15);</li> <li>- Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 6);</li> <li>- Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);</li> <li>- Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 5);</li> <li>- Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 93);</li> <li>- Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 92 Tahun 2021 Tentang Pedoman pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;</li> <li>- Surat Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 422 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Wewenang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2022.</li> </ul>
3. Alasan Kegiatan Dilaksanakan	: Terlaksananya jasa surat menyurat dalam rangka meningkatnya pelayanan teknis administrasi, pengelolaan keuangan, umum dan kepegawaian
4. Kegiatan Yang Dilaksanakan (what)	:
Uraian Kegiatan	:
Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Oprasional kegiatan kantor berjalan lancar</li> <li>- Membantu memperlancar tugas dinas dan memberikan pelayanan maksimal</li> </ul>
5. Indikator Keluaran dan Keluaran	:
Indikator Keluaran (kualitatif)	: Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
Keluaran (kuantitatif)	: Terlaksananya pemenuhan belanja barang habis pakai ( materai, buku cek, dan benda pos lainnya )
	: Terlaksananya belanja jasa kantor ( belanja cetak/kiriman )
6. Cara Pelaksanaan Kegiatan (how)	:
Metode Pelaksanaan	: Swakelola
Tahapan Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Disposisi surat masuk dan surat keluar</li> <li>2. Jika ke surat luar daerah, membuat persetujuan prinsip dari Sekda/Bupati</li> <li>3. Membuat surat perintah tugas yang ditandatangani pimpinan</li> </ol>
7. Tempat pelaksanaan Kegiatan (where)	: Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Sarilamak

8. Pelaksana dan Penanggung Jawab Kegiatan (who)

Pelaksana kegiatan  
Penanggungjawab kegiatan  
Penerima manfaat

: PPTK  
: PA  
: ASN Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

9. Jadwal Kegiatan

Waktu pelaksanaan kegiatan (when)  
Matriks pelaksanaan kegiatan (time table)

: 4 (empat) bulan

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agt	Sep	Okt	Nop	Des

10. Biaya (how much): total biaya yang diperlukan dalam kegiatan

Rp 3.000.000

Sarilamak, 05 Januari 2022

PPTK

AFRIZAL.S.Sos.,M.Si

NIP. 19720817 199202 1 001





# KERANGKA ACUAN KERJA

SKPD  
Program  
Sasaran Program  
Kegiatan  
Sub Kegiatan

- 1 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
- 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
- 1 Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah
- 1 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

## Detail Kegiatan

### 1. Latar Belakang (why)

- 1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Internet sangat dibutuhkan didalam kegiatan operasional perkantoran, sehingga pemenuhan kebutuhannya sangat menunjang kelancaran kegiatan agar lebih efektif, cepat dan efisien.

### 2. Dasar Hukum

- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 04 Tahun 2001 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 15);
- Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 6);
- Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
- Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 5);
- Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 93);
- Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 92 Tahun 2021 Tentang Pedoman pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Surat Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 422 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Wewenang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2022.

### 3. Alasan Kegiatan Dilaksanakan

- 1 Terpenuhinya kebutuhan Komunikasi, Air, Listrik dan Internet

### 4. Kegiatan Yang Dilaksanakan (what) Uraian Kegiatan

- 1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik dan Internet sangat dibutuhkan didalam kegiatan operasional perkantoran, sehingga pemenuhan kebutuhannya sangat menunjang kelancaran kegiatan agar lebih efektif, cepat dan efisien

### Tujuan

- 1 Terpenuhinya kebutuhan Komunikasi, Air, Listrik dan Internet

### 5. Indikator Keluaran dan Keluaran Indikator Keluaran (kualitatif) Keluaran (kuantitatif)

- 1 Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
- 1 Terlaksananya pemenuhan kebutuhan untuk kelancaran kegiatan agar lebih efektif, cepat dan efisien.

### 6. Cara Pelaksanaan Kegiatan (how) Metode Pelaksanaan Tahapan Kegiatan

- 1 Swakelola
- 1. Pembayaran perbulan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
- 2. Mencetak faktur pembayaran
- 3. Pembuatan SPJ kegiatan

### 7. Tempat pelaksanaan Kegiatan (where)

- 1 Kantor Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

- : PPTK
- : PA
- : ASN Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

- : 12 (dua belas) bulan

[illegible]

- Rp 47.794.800



Sarilamak, 05 Januari 2022

**PPTK**

**AFRIZAL.S.Sos.,M.Si**  
**NIP. 19720817 199202 1 001**



# KERANGKA ACUAN KERJA

SKPD  
Program  
Sasaran Program  
Kegiatan  
Sub Kegiatan

- : DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
- : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
- : Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah
- : Administrasi Umum Perangkat Daerah
- : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

## Detail Kegiatan

1. Latar Belakang (why)
  - : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga sangat dibutuhkan didalam kegiatan operasional perkantoran dimana penyediaan peralatan rumah tangga merupakan kegiatan belanja langsung untuk mengakomodir kebutuhan pokok administrasi perkantoran.
2. Dasar Hukum
  - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 04 Tahun 2001 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 15);
  - Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 6);
  - Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
  - Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 5);
  - Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 93);
  - Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 92 Tahun 2021 Tentang Pedoman pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;
  - Surat Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 422 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Wewenang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2022.
3. Alasan Kegiatan Dilaksanakan
  - : Kegiatan ini dilaksanakan karena sangat pentingnya penyediaan peralatan rumah tangga di kantor, guna menunjang pelaksanaan operasional kantor antara lain piring makan, piring kue, gelas dan cangkir set.
4. Kegiatan Yang Dilaksanakan (what)  
Uraian Kegiatan
  - : Penyediaan peralatan rumah tangga sangat dibutuhkan didalam kegiatan operasional perkantoran, sehingga pemenuhan kebutuhannya sangat menunjang kelancaran kegiatan agar lebih efektif, cepat dan efisien
- Tujuan
  - Agar kegiatan operasional kantor dapat berjalan lancar
  - Tersedianya peralatan rumah tangga sebagai bahan
5. Indikator Keluaran dan Keluaran  
Indikator Keluaran (kualitatif)  
Keluaran (kuantitatif)
  - : Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
  - : Menunjang kegiatan kantor
6. Cara Pelaksanaan Kegiatan (how)  
Metode Pelaksanaan  
Tahapan Kegiatan
  - : Swakelola
  - 1. Menyiapkan surat pesanan pembelian peralatan rumah tangga
  - 2. Melakukan pembelian dan menyiapkan kuitansi
  - 3. Menyiapkan kelengkapan SPJ
  - 4. Penandatanganan SPJ

7. Tempat pelaksanaan Kegiatan (where) : Kantor Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
8. Pelaksana dan Penanggung Jawab Kegiatan (who)
- Pelaksana kegiatan : PPTK
  - Penanggungjawab kegiatan : PA
  - Penerima manfaat : ASN Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

9. Jadwal Kegiatan

Waktu pelaksanaan kegiatan (when) : 2 (dua) bulan

Matriks pelaksanaan kegiatan (time table)

- Menyiapkan surat pesanan pembelian peralatan rumah tangga
- Melakukan pembelian dan menyiapkan kuitansi
- Menyiapkan kelengkapan SPJ Penandatanganan SPJ

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agt	Sep	Okt	Nop	Des

10. Biaya (how much): total biaya yang diperlukan

Rp 5.188.000

Sarilamak, 05 Januari 2022

PPTK



AFRIZAL S.Sos., M.Si  
NIP. 19720817 199202 1 001



# KERANGKA ACUAN KERJA

SKPD  
Program  
Sasaran Program  
Kegiatan  
Sub Kegiatan

## Detail Kegiatan

1. Latar Belakang (why)
  - : Operasional kantor tidak terlepas dari tersedianya bahan logistik, seperti tersedianya alat tulis kantor dan bahan/alat untuk kebutuhan kantor lainnya. Tanpa adanya bahan tersebut, maka kantor tidak akan beroperasional.
2. Dasar Hukum
  - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 04 Tahun 2001 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 15);
  - Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 6);
  - Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
  - Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 5);
  - Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 93);
  - Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 92 Tahun 2021 Tentang Pedoman pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;
  - Surat Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 422 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Wewenang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2022.
3. Alasan Kegiatan Dilaksanakan
  - : Kegiatan ini dilaksanakan karena sangat pentingnya penyediaan bahan logistik di kantor, guna menunjang pelaksanaan operasional kantor antara lain penyediaan ATK, bahan pembersih dan alat kebersihan kantor
4. Kegiatan Yang Dilaksanakan (what)  
Uraian Kegiatan
  - : Kegiatan penyediaan bahan logistik antara lain berupa : penyediaan atk, dan penyediaan alat/bahan kantor lainnya seperti alat-alat kebersihan kantor
- Tujuan
  - Agar kegiatan operasional kantor dapat berjalan lancar
  - Menjaga kebersihan kantor
  - Tersedianya bahan logistik kantor sebagai bahan penunjang pelaksanaan pekerjaan administrasi pelayanan perkantoran
5. Indikator Keluaran dan Keluaran  
Indikator Keluaran (kualitatif)  
Keluaran (kuantitatif)
  - : Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
  - : Menunjang kegiatan kantor
  - : Peningkatan kebersihan kantor
6. Cara Pelaksanaan Kegiatan (how)  
Metode Pelaksanaan  
Tahapan Kegiatan
  - : Swakelola
  - 1. Menyiapkan surat pesanan pembelian ATK dan Alat kebersihan
  - 2. Melakukan pembelian dan menyiapkan kuitansi
  - 3. Menyiapkan kelengkapan SPJ
  - 4. Penandatanganan SPJ

7. Tempat pelaksanaan Kegiatan (where) : Kantor Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

8. Pelaksana dan Penanggung Jawab Kegiatan (who) : PPTK  
 Pelaksana kegiatan : PA  
 Penanggungjawab kegiatan : ASN Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja  
 Penerima manfaat :

9. Jadwal Kegiatan : 11 (sebelas) bulan  
 Waktu pelaksanaan kegiatan (when)  
 Matriks pelaksanaan kegiatan (time table)

- Menyiapkan surat pesanan pembelian ATK dan Alat kebersihan
- Melakukan pembelian dan menyiapkan kuitansi
- Menyiapkan kelengkapan SPJ Penandatanganan SPJ

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agt	Sep	Okt	Nop	Des

10. Biaya (how much): total biaya yang diperlukan dalam Rp 25.003.400

Sarilamak, 05 Januari 2022

PPTK

AFRIZAL.S.Sos..M.Si  
 NIP. 19720817 199202 1 001





# KERANGKA ACUAN KERJA

SKPD  
Program  
Sasaran Program  
Kegiatan  
Sub Kegiatan

## Detail Kegiatan

1. Latar Belakang (why)
  - : Operasional kantor tidak terlepas dari tersedianya barang cetakan dan penggandaan, seperti tersedianya barang cetakan (map, amplop, kuitansi, dll) serta kebutuhan akan fotocopy/enggandaan dokumen kantor. Tanpa adanya bahan tersebut, maka kantor tidak akan beropasional.
2. Dasar Hukum
  - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 04 Tahun 2001 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 15);
  - Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 6);
  - Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
  - Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 5);
  - Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 93);
  - Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 92 Tahun 2021 Tentang Pedoman pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;
  - Surat Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 422 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Wewenang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2022.
3. Alasan Kegiatan Dilaksanakan
  - : Kegiatan ini dilaksanakan karena sangat pentingnya penyediaan barang cetakan dan penggandaan dokumen kantor
4. Kegiatan Yang Dilaksanakan (what)  
Uraian Kegiatan
  - : Kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan antara lain : cetak amplop dinas, cetakmap dinas, cetak blanko kuitansi, cetak blanko disposisi, dll serta penggandaan/fotocopy dokumen kantor.
  - : Agar kegiatan operasional kantor dapat berjalan lancar
- Tujuan
5. Indikator Keluaran dan Keluaran  
Indikator Keluaran (kualitatif)  
Keluaran (kuantitatif)
  - : Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
  - : Tersedianya barang cetakan untuk kegiatan administrasi perkantoran yang lengkap
6. Cara Pelaksanaan Kegiatan (how)  
Metode Pelaksanaan  
Tahapan Kegiatan
  - : Swakelola
  - 1. Menyiapkan surat pesanan barang cetakan
  - 2. Melakukan pembelian dan menyiapkan kuitansi pembayaran
  - 3. Menyiapkan kelengkapan SPJ
  - 4. Penandatanganan SPJ
  - : Kantor Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
7. Tempat pelaksanaan Kegiatan (where)
8. Pelaksana dan Penanggung Jawab Kegiatan (who)  
Pelaksana kegiatan  
Penanggungjawab kegiatan  
Penerima manfaat
  - : PPTK
  - : PA
  - : ASN Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

9. Jadwal Kegiatan

Waktu pelaksanaan kegiatan (when)

Matriks pelaksanaan kegiatan (time table)

- Menyiapkan surat pesanan pembelian barang cetakan
- Melakukan pembelian dan menyiapkan kuitansi pembayaran
- Menyiapkan kelengkapan SPJ
- Penandatanganan SPJ


: 12 (dua belas) bulan

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agt	Sep	Okt	Nop	Des

10. Biaya (how much): total biaya yang diperlukan dalam

Rp 25.031.000

Diketahui/disetujui oleh  
PENGUNA ANGGARAN

  
**FERY CHOE SIH,LL.M**  
NIP. 19700209 199803 1 002

Sarilamak, Januari 2022

PPTK

  
**AFRIZAL S. Sos. M. Si**  
NIP. 19720817 199202 1 001



# KERANGKA ACUAN KERJA

SKPD  
Program  
Sasaran Program  
Kegiatan  
Sub Kegiatan

## Detail Kegiatan

1. Latar Belakang (why)

2. Dasar Hukum

3. Alasan Kegiatan Dilaksanakan

4. Kegiatan Yang Dilaksanakan (what)  
Uraian Kegiatan

Tujuan

5. Indikator Keluaran dan Keluaran  
Indikator Keluaran (kualitatif)  
Keluaran (kuantitatif)

6. Cara Pelaksanaan Kegiatan (how)  
Metode Pelaksanaan  
Tahapan Kegiatan

- : DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
- : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
- : Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah
- : Administrasi Umum Perangkat Daerah
- : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- :
- : Penerangan bangunan gedung kantor dan pemenuhan komponen listrik lainnya sangat dibutuhkan dalam rangka operasional kantor.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 04 Tahun 2001 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 15);
- Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 6);
- Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
- Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 5);
- Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 93);
- Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 92 Tahun 2021 Tentang Pedoman pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Surat Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 422 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Wewenang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2022.
- Sangat dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas dan operasional kantor
- Tersedianya pembiayaan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor untuk 12 bulan kerja
- : Belanja barang alat-alat listrik, antara lain : bohlam, acu genset, kabel-kabel, terminal listrik, dll.
- : Optimalisasi pelaksanaan tugas dan operasional kantor
- :
- : Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
- : Terasilinasinya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- :
- : Swakelola
- 1. Menyiapkan surat pesanan pembelian alat-alat listrik
- 2. Melakukan pembelian dan menyiapkan kuitansi
- 3. Menyiapkan kelengkapan SPJ
- 4. Penandatanganan SPJ

7. Tempat pelaksanaan Kegiatan (where) : Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja, Sarilamak

8. Pelaksana dan Penanggung Jawab Kegiatan (who) :

Pelaksana kegiatan : PPTK

Penanggungjawab kegiatan : PA

Penerima manfaat : ASN Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

9. Jadwal Kegiatan : 9 (sembilan) bulan

Waktu pelaksanaan kegiatan (when)

Matriks pelaksanaan kegiatan (time table)


Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agt	Sep	Okt	Nop	Des

- Menyiapkan surat pesanan pembelian alat-alat listrik
- Melakukan pembelian dan menyiapkan kuitansi
- Menyiapkan kelengkapan SPJ
- Penandatanganan SPJ

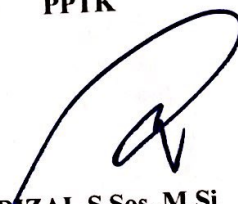
10. Biaya (how much): total biaya yang diperlukan dalam kegiatan Rp 7.505.000

Sarilamak, Januari 2022

Diketahui/disetujui oleh  
PENGGUNA ANGGARAN

  
**FERY CHOFA S.,LL.M**  
NIP. 19700209 199803 1 002

PPTK

  
**AFRIZAL S. Sos., M.Si**  
NIP. 19720817 199202 1 001



# KERANGKA ACUAN KERJA

SKPD  
Program  
Sasaran Program  
Kegiatan  
Sub Kegiatan

## Detail Kegiatan

1. Latar Belakang (why)
  - : Penyediaan Jasa Pelayanan Perkantoran sangat dibutuhkan didalam kegiatan operasional perkantoran, sehingga pemenuhan kebutuhannya sangat menunjang kelancaran kegiatan.
2. Dasar Hukum
  - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 04 Tahun 2001 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 15);
  - Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 6);
  - Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
  - Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 5);
  - Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 93);
  - Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 92 Tahun 2021 Tentang Pedoman pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;
  - Surat Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 422 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Wewenang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2022.
3. Alasan Kegiatan Dilaksanakan
  - : Terpenuhinya kebutuhan pelayanan umum kantor
4. Kegiatan Yang Dilaksanakan (what)  
Uraian Kegiatan
  - : Penyediaan Jasa pelayanan umum kantor sangat dibutuhkan didalam kegiatan operasional perkantoran, sehingga pemenuhan kebutuhannya sangat menunjang kelancaran kegiatan agar lebih efektif, cepat dan efisien
- Tujuan
  - : Terpenuhinya kebutuhan pelayanan umum kantor
5. Indikator Keluaran dan Keluaran  
Indikator Keluaran (kualitatif)  
Keluaran (kuantitatif)
  - : Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
  - : Terlaksananya pemenuhan kebutuhan untuk kelancaran kegiatan agar lebih efektif, cepat dan efisien.
6. Cara Pelaksanaan Kegiatan (how)  
Metode Pelaksanaan  
Tahapan Kegiatan
  - : Swakelola
  - 1. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang dibutuhkan
  - 2. Mencetak faktur pembayaran
  - 3. Pembuatan SPJ kegiatan
7. Tempat pelaksanaan Kegiatan (where)
  - : Kantor Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
8. Pelaksana dan Penanggung Jawab Kegiatan (who)  
Pelaksana kegiatan  
Penanggungjawab kegiatan  
Penerima manfaat
  - : PPTK
  - : PA
  - : ASN Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

9. Jadwal Kegiatan

Waktu pelaksanaan kegiatan (when)

Matriks pelaksanaan kegiatan (time table)

: 11 (sebelas) bulan

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agt	Sep	Okt	Nop	Des

10. Biaya (how much): total biaya yang diperlukan

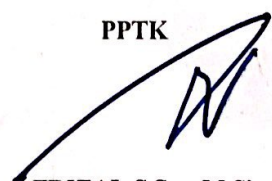
Rp

343.320.000



Sarilamak, 05 Januari 2022

PPTK

  
**AFRIZAL S. Sos., M. Si**  
NIP. 19720817 199202 1 001



# KERANGKA ACUAN KERJA

SKPD

Program

Sasaran Program

Kegiatan

Sub Kegiatan

## Detail Kegiatan

1. Latar Belakang (why)

2. Dasar Hukum

3. Alasan Kegiatan Dilaksanakan

4. Kegiatan Yang Dilaksanakan (what)  
Uraian Kegiatan

Tujuan

5. Indikator Keluaran dan Keluaran  
Indikator Keluaran (kualitatif)  
Keluaran (kuantitatif)

6. Cara Pelaksanaan Kegiatan (how)  
Metode Pelaksanaan  
Tahapan Kegiatan

7. Tempat pelaksanaan Kegiatan (where)

8. Pelaksana dan Penanggung Jawab Kegiatan (who)  
Pelaksana kegiatan  
Penanggungjawab kegiatan  
Penerima manfaat

: DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA

: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

: Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah

: Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

: Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

: Kondisi gedung kerja yang baik dan kondusif sangat mendukung dan dibutuhkan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi OPD. Masih layak atau kurang kondisi gedung kerja, maka dilakukan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor.

- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

- Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 04 Tahun 2001 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 15);

- Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 6);

- Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);

- Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 5);

- Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 93);

- Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 92 Tahun 2021 Tentang Pedoman pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;

- Surat Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 422 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Wewenang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2022.

: Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kenyamanan dan kebersihan pemeliharaan/perawatan bangunan dan halaman gedung kantor Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota

: Kegiatan ini adalah pemeliharaan/rehabilitasi gedung atau bangunan kantor

: Agar kegiatan operasional kantor dapat berjalan lancar

:  
- Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja  
- Terpenuhi dan terwujudnya pemeliharaan dan rehab gedung kantor

: Swakelola

1. Mengidentifikasi kerusakan gedung kantor  
2. Menentukan pihak ke 3 (tukang) yang akan memperbaiki gedung kantor  
3. Melakukan perbaikan

: Kantor Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

: PPTK

: PA

: ASN Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

Pelaksana dan Penanggung Jawab Kegiatan (who)

Pelaksana kegiatan

Penanggungjawab kegiatan

Penerima manfaat

Jadwal Kegiatan

Waktu pelaksanaan kegiatan (when)

Matriks pelaksanaan kegiatan (time table)

: PPTK

: PA

: ASN Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

: 12 (dua belas) bulan

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agt	Sep	Okt	Nop	Des

- Melakukan servis dan penggantian suku cadang kendaraan dinas secara berkala
- Pembelian BBM untuk operasional kendaraan dinas
- Melakukan pembayaran perizinan kendaraan

0. Biaya (how much): total biaya yang diperlukan dalam kegiatan

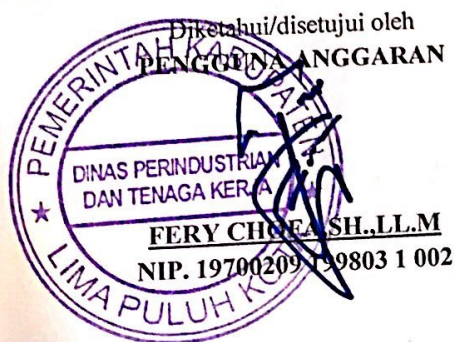
Rp 120.006.000

Sarilamak, 05 Januari 2022

PPTK

AFRIZAL.S.Sos.,M.Si

NIP. 19720817 199202 1 001





# KERANGKA ACUAN KERJA

SKPD  
Program  
Sasaran Program  
Kegiatan  
Sub Kegiatan

## Detil Kegiatan

### 1. Latar Belakang (why)

### 2. Dasar Hukum

### 3. Alasan Kegiatan Dilaksanakan

### 4. Kegiatan Yang Dilaksanakan (what) Uraian Kegiatan

#### Tujuan

#### i. Indikator Keluaran dan Keluaran Indikator Keluaran (kualitatif) Keluaran (kuantitatif)

#### ii. Cara Pelaksanaan Kegiatan (how) Metode Pelaksanaan Tahapan Kegiatan

#### 7. Tempat pelaksanaan Kegiatan (where) 8. Pelaksana dan Penanggung Jawab Kegiatan (who) Pelaksana kegiatan Penanggungjawab kegiatan Penerima manfaat

- : DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
- : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
- : Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah
- : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

- : Peralatan dan mesin, seperti komputer, laptop, printer, AC dan genset sangat mendukung dan dibutuhkan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi OPD. Masih layak atau tidak peralatan dan mesin sangat tergantung pada pemeliharaan yang dilakukan, baik servis dan penggantian suku cadang yang dilakukan secara berkala.

- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 04 Tahun 2001 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 15);
- Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 6);
- Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
- Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 5);
- Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 93);
- Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 92 Tahun 2021 Tentang Pedoman pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Surat Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 422 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Wewenang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2022.

- : Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka pemeliharaan aset pemerintah daerah berupa peralatan dan mesin lainnya sehingga operasional kantor berjalan lancar.

- : Kegiatan ini adalah penyediaan jasa pemeliharaan servis dan penggantian suku cadang komputer, laptop, printer, AC dan genset secara berkala

- : Agar terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- : Mendukung pelaksanaan dan pelayanan kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- : Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
- : Terpenuhinya pemeliharaan peralatan kantor dan mesin lainnya untuk

- : Swakelola
- 1. Mengidentifikasi peralatan dan mesin yang ada
- 2. Melakukan servis dan penggantian suku cadang mesin dan peralatan

- : Kantor Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

- : PPTK
- : PA
- : ASN Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

9. Jadwal Kegiatan

Waktu pelaksanaan kegiatan (when)

Matriks pelaksanaan kegiatan (time table)

- Mengidentifikasi peralatan dan mesin yang ada
- Melakukan servis dan penggantian suku cadang

: 9 (sembilan) bulan

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agt	Sep	Okt	Nop	Des

10. Biaya (how much): total biaya yang diperlukan dalam

Rp

19.370.000



Diketahui/disetujui oleh

PENGUNA ANGGARAN

DINAS PERINDUSTRI  
DAN TENAGA KERJA

FERY CHINTA, SH., LL.M

NIP. 19700209 199803 1 002

Sarilamak, 05 Januari 2022

PPTK

AFRIZAL S. Sos., M. Si

NIP. 19720817 199202 1 001



# KERANGKA ACUAN KERJA

SKPD  
Program  
Sasaran Program  
Kegiatan

Sub Kegiatan

Detail Kegiatan

1. Latar Belakang (why)

2. Dasar Hukum

3. Alasan Kegiatan Dilaksanakan

4. Kegiatan Yang Dilaksanakan (what)  
Uraian Kegiatan

Tujuan

5. Indikator Keluaran dan Keluaran  
Indikator Keluaran (kualitatif)  
Keluaran (kuantitatif)

6. Cara Pelaksanaan Kegiatan (how)  
Metode Pelaksanaan  
Tahapan Kegiatan

7. Tempat pelaksanaan Kegiatan (where)

8. Pelaksana dan Penanggung Jawab Kegiatan (who)  
Pelaksana kegiatan  
Penanggungjawab kegiatan  
Penerima manfaat

- : DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
- : PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
- : Persentase pelaksanaan penunjang urusan Pemerintahan Daerah
- : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- : Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- : Kondisi gedung kerja yang baik dan kondusif sangat mendukung dan dibutuhkan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi OPD. Masih layak atau kurang kondisi gedung kerja, maka dilakukan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 04 Tahun 2001 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 15);
- Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 6);
- Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
- Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 5);
- Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 93 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 93);
- Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 92 Tahun 2021 Tentang Pedoman pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Surat Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 422 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Wewenang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2022.
- : Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kenyamanan dan kebersihan pemeliharaan/perawatan bangunan dan halaman gedung kantor Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota
- : Kegiatan ini adalah pemeliharaan/rehabilitasi gedung atau bangunan kantor
- : Agar kegiatan operasional kantor dapat berjalan lancar
- :
  - Nilai Akuntabilitas Kinerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
  - Terpenuhi dan terwujudnya pemeliharaan dan rehab gedung kantor
- :
  - : Swakelola
  - 1. Mengidentifikasi kerusakan gedung kantor
  - 2. Menentukan pihak ke 3 (tukang) yang akan memperbaiki gedung kantor
  - 3. Melakukan perbaikan
- : Kantor Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
- : PPTK
- : PA
- : ASN Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja

9. Jadwal Kegiatan

Waktu pelaksanaan kegiatan (when)

Matriks pelaksanaan kegiatan (time table)

- Mengidentifikasi kerusakan gedung kantor
- Menentukan pihak ke 3 (tukang) yang akan memperbaiki gedung kantor
- Melakukan perbaikan

: 3 (tiga) bulan

Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Juni	Juli	Agt	Sep	Okt	Nop	Des

10. Biaya (how much): total biaya yang diperlukan

Rp

14.560.000

Sarilamak, 05 Januari 2022

PPTK

AFRIZAL.S.Sos.,M.Si

NIP. 19720817 199202 1 001

